

**ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBERIAN PINJAMAN BERGULIR
PNPM MANDIRI PERKOTAAN KEPADA USAHA KECIL DAN
MENENGAH DI DESA BULUSULUR KECAMATAN WONOGIRI
KABUPATEN WONOGIRI**

Oleh:

Leo Giri Sasana

(14010110120084)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

Abstract

Eradicating poverty is one of the main case in Indonesian livelihood. Since the independence day of Indonesia's republic. The exertions to increased life's quality and eradicating poverty always efforted by them till this recent time. Its throughed by PNPM urban private. Based on empowerment which has purposes as sustaiaable development and can be synergized through societies within poverty's problem solving. This research is limited by limitation space and also factors which can be called as obstacle of implementation in Wonogiri regency. Particularly in Bulusulur village. This research uses descriptive qualitative by college data technique through interview. Its name preferencing informan purposive sampling.

The result of roll loan giving program PNPM urban private towards small and medium enterprises in Bulusulur village, Wonogiri district, Wonogiri regency showed that this program was able to reached the purposes and targets throughed standart dimension and policy's goal, implementation sources, communication, implementor agency characterictics, implementor disposition, and environmental condition towards sosial,economy and politics. The loan giving program has been assisted the lowest societies in giving loan modal towards the small enterprises and also assisted to improved the family's income. Yet in this case is still faced many obstacles. Such as the less of loan or KSM within giving back of loan, and there's no an available ingredients in that surrounding.

Recomendation.this research is expected to be able keep along and increase the same program, and build closer relationship between implementor, all target communities and founding the other new enterprises.

Keywords : Program impelementation, Loan Revolving, Small and Medium Enterprises, Village of Bulusulur.

A. PENDAHULUAN

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu faktor utama dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, upaya peningkatan kualitas hidup dan menanggulangi kemiskinan terus diupayakan hingga saat ini. Banyak upaya pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan, dari waktu ke waktu namun masalah ini tidak semudah yang dibayangkan. Rakyat semakin memahami kebutuhan hidup yang kian meningkat karena masuknya era modernisasi sebagaimana tuntutan hidup yang lebih tinggi. Maka dalam perubahan ini masyarakat dituntut mampu mengikuti perkembangan. Penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan menyebabkan adanya kesenjangan antara yang mampu mengikuti perkembangan dengan masyarakat yang sulit bergerak sehingga semakin bertambahnya tingkat kemiskinan.

Konteks kemiskinan erat hubungannya antara daya masyarakat dengan akses ekonomi yang terbatas, di antaranya ialah akses produktifitas ekonomi itu sendiri. Suatu keberhasilan ekonomi dapat ditunjang dari berbagai aspek hal, diantaranya dengan memiliki keberdayaan mereka sendiri atau dengan produktifitas yang tinggi sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomi. Sektor produksi itu sendiri meliputi, lahan pertanian, perdagangan, kerajinan, pasar, industri dan yang menyangkut produktifitas lainnya. Jika masyarakat tidak memiliki daya dan akses produksi yang baik maka kemiskinan tidak dapat dihindarkan lagi.

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya.

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah.

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu daerah yang menjalankan program PNPM Mandiri Perkotaan. Wujud program kebijakan yang mengedepankan pemberdayaan. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan kepada Usaha Kecil dan Menengah di

Kabupaten Wonogiri khususnya di Desa Bulusur Kecamatan Wonogiri dan melihat faktor apakah yang menghambat pelaksanaan implementasi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) Dalam implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi,

1. Standard dan sasaran kebijakan
2. Sumberdaya
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivis
4. Karakteristik agen pelaksana
5. Disposisi Implementor
6. Lingkungan Kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Hubungan antar variabel tersebut masing-masing adalah,

1. Standard dan sasaran kebijakan. Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan satu sasaran kebijakan jelas dan terukur dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujud. Dalam standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga tidak bisa terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan kesalahpahaman dan konflik diantara agen implementasi.
2. Sumber Daya Implementasi. Suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya

manusia, maupun sumber daya material, dan sumber daya metodis. Ketiga sumber daya tersebut, yang paling penting adalah sumber daya manusia karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.

3. Komunikasi antar organisasi. Dalam berbagai program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan baik dari antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan satu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.
4. Karakteristik agen pelaksana. Dalam satu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma- norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi satu program kebijakan yang telah ditentukan.

5. Disposisi implementor. Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu :

- 1) Respon implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik.
- 2) Kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut

6. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis dimana penelitian berfungsi untuk menjelaskan fenomena suatu kejadian, kegiatan dan atau implementasi kebijakan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi.

Dalam menganalisis data penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan menanyakan secara langsung kepada informan. Adapun yang bertindak sebagai informan adalah pihak-pihak yang bersangkutan. Individu dan atau kelompok yang merupakan pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan diantaranya ialah tim fasilitator, relawan Badan Keswadayaan Masyarakat /LKM, Kepala Desa, dan KSM atau Kelompok Swadaya Masyarakat di Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri, Kab. Wonogiri.

B. PEMBAHASAN

Tujuan pinjaman bergulir sama dengan konsep pemberdayaan. Masyarakat sebagai peran utama di dalam pelaksanaan program pinjaman bergulir. Masyarakat dituntut mampu berdaya sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri. Pinjaman bergulir hanya merupakan fasilitas agar usaha dalam sektor perekonomian masyarakat lebih berkembang. Implementasi pemberian pinjaman bergulir PNPM mandiri perkotaan di Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri ialah sebagai berikut.

1. Standard dan Sasaran Kebijakan

Standard dan sasaran program pinjaman bergulir ini mengacu pada dasar hukum PNPM MP sebagaimana menjadi dasar hukum PNPM Mandiri adalah Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir dalam PNPM Mandiri Perkotaan bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang biasanya tidak memiliki akses ke sumber pinjaman lainnya, untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan kegiatan yang mendukung tumbuhnya ekonomi serta usaha mikro disamping itu membelajarkan mereka dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar.

Kelompok sasaran atau masyarakat maka akan memperoleh manfaat dari BLM, diolah sebagai dana pinjaman bergulir untuk menunjang kegiatan usaha kecil masyarakat. Pinjaman bergulir sebagai modal usaha agar masyarakat berdaya guna dengan usahanya sendiri. Manfaat ini diharapkan mampu memberikan efek yang berkelanjutan.

Tetapi dalam hal ini tentu tidak terlepas dari adanya hambatan yang selalu menjadi masalah. Adanya kemacetan dalam pengembalian pinjaman. Berdasarkan masalah tersebut dapat berdampak pada kelancaran program pemberian pinjaman bergulir. Hal ini merupakan hambatan utama dalam memberdayakan masyarakat itu sendiri.

2. Sumber Daya Implementasi

Unit-unit yang ada dalam program pinjaman bergulir berporos pada BKM atau Badan Keswadayaan Masyarakat, pada desa ataupun kelurahan yang telah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan perkotaan yang telah membentuk Lembaga Keswadayaan Masyarakat

yang selanjutnya disebut Badan Keswadayaan Masyarakat. BKM dituntut memiliki kriteria kinerja yang baik. Menjaga produktivitas Badan Keswadayaan Masyarakat itu sendiri untuk bekerja demi masyarakatnya. Proses pembentukan sesuai asas keterwakilan, partisipatif, akuntabel dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat setempat. Badan Keswadayaan Masyarakat desa Bulusur dibentuk pada tahun 2007, hingga sekarang bernama Badan Keswadayaan Masyarakat “BANGKIT”.

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh di dalam melaksanakan program pinjaman bergulir, maka dalam menjadi bagian implementor tidak sembarang orang bisa menjadi implementor. Pelaksanaan sebuah program diperlukan implementor yang memiliki kemampuan memahami dan mengaplikasikan program dengan baik sehingga tujuan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Seorang implementor harus paham akan tujuan, sasaran, serta detail program agar dalam penyampaian dan aplikasinya dapat berjalan sesuai harapan.

Implementor di sini yang paling berperan ialah fasilitator karena mereka mendampingi masyarakat dengan menyampaikan program dan mengarahkan hingga program berjalan sebaik mungkin. Kemampuan fasilitator secara kriteria sudah terpenuhi, tentu dalam bidang akademik ditambah lagi bidang pelatihan-pelatihan fasilitator akan lebih menambah kemampuan dalam mengarahkan program pinjaman bergulir.

Alokasi dana pinjaman bergulir dapat berasal dari, BLM atau dana Bantuan Langsung Masyarakat, sekaligus sumber utama, APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana dari pihak swasta, dana swadaya masyarakat, laba/ keuntungan pengelolaan pinjaman bergulir, dan dana dari sumber channeling/ kemitraan dari lembaga formal baik bank maupun koperasi.

Penggunaan dana BLM dialokasikan untuk kegiatan PB sesuai ketentuan PNPM MP, maka pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan pinjaman bergulir yang berorientasi pada masyarakat miskin.

3. Komunikasi

Komunikasi dalam hal ini dibangun yang utama pada pelaksana program itu sendiri khususnya Implementor program pinjaman bergulir sendiri. Konteks komunikasi pertama dalam hal ini dan yang menjadi utama ialah komunikasi sesama implementor pinjaman bergulir, seperti yang dilaksanakan di desa Bulusur Kecamatan Wonogiri, yaitu Fasilitator, BKM, serta UPK. Mereka merupakan implementor utama dalam hal program pinjaman bergulir ini. Implementor di sini berkaitan erat dengan pelaksanaan program, karena mereka sebagai ujung penentu keberhasilan program pinjaman bergulir yang dilaksanakan di desa Bulusur khususnya.

Selama ini hubungan yang dibina antar implementor dapat dikatakan sangat harmonis. Tidak sebatas implementor saja namun dengan Kepala desa, perangkat desa dan masyarakatpun terjalin cukup harmonis. Komunikasi yang dibina antara Implementor dengan masyarakat,

khususnya kelompok sasaran program pinjaman bergulir, pada umumnya dilakukan dengan cara formal dan informal. Komunikasi formal tentu dengan satu acara rapat maupun pertemuan dengan kelompok sasaran atau KSM.

Komunikasi antara implementor dan kelompok sasaran atau KSM memang belum terprogram seperti rapat BKM yang diadakan setiap tanggal 15, namun dalam hubungannya komunikasi tetap terbina dengan baik melalui percakapan ataupun obrolan informal karena latar belakang para implementor dan kelompok sasaran sama sama warga penduduk setempat.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Implementasi kebijakan yang baik agar mampu mencapai keberhasilan suatu program dengan maksimal maka harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana. Dalam hal ini agen pelaksana mengacu pada struktur birokrasi dan ketersediaan *Standard Operational Procedure* (SOP). Berikut struktur birokrasi di tingkat kelurahan/ desa,

Tingkat kelurahan / Desa

1. Lurah/ Kades dan perangkat
2. Relawan Masyarakat
3. Lembaga Keswadayaan Masyarakat

Sekretariat

Pengawas Unit Pengelola Keuangan

Unit Pengelola Lingkungan

Unit Pengelola Keuangan

Unit Pengelola Sosial

Kelompok Swadaya Masyarakat

4. Kelompok Swadaya Masyarakat

5. Fasilitator Kelurahan

SOP (*Standard operating prosedure*) berbentuk dalam buku pedoman yang digunakan dalam memudahkan program pinjaman bergulir berinduk dari buku panduan umum PNPM Mandiri Perkotaan. Buku panduan tersebut memuat beberapa konsep didalamnya, antara lain yaitu, kerangka pemikiran, prinsip, pendekatan dasar hukum, tujuan sasaran, strategi, komponen program serta pelaksanaan program. Selanjutnya digunakan buku pedoman pelaksanaan pinjaman bergulir untuk lebih berfokus pada program pinjaman bergulir, karena buku pedoman umum membahas konsep PNPM Mandiri Perkotaan secara umum. Buku Pedoman pelaksanaan Pinjaman Bergulir didalamnya terdapat, latar belakang, strategi, prinsip, ketentuan dasar serta tahap pelaksanaan pinjaman bergulir.

5. Disposisi Implementor

Program pinjaman bergulir sangat menuntut adanya partisipasi masyarakat yang tinggi. Demi partisipasi masyarakat yang tinggi maka

para pelaksana program diharapkan mampu mengedepankan sikap demokratis, antusias, responsif terhadap masyarakat terutama kelompok sasaran. Partisipasi tersebut akan terwujud bila ada pemantik yang baik, yaitu dengan cara respons yang ditunjukkan kepada masyarakat itu sendiri. Sikap Implementor sendiri mencerminkan sikap demokratis dengan menanggapi berbagai saran dan kritik sehingga masyarakat merasa diperhatikan.

6. Kondisi Lingkungan, Sosial, Ekonomi dan Politik

Kunci keberhasilan program pinjaman bergulir tidak hanya terpancang pada sisi kebijakan dan pelaksana kebijakan saja namun lebih jauh dari itu ada faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilannya yaitu lingkungan. Lingkungan itu sendiri terkait beberapa hal pertama ialah sumber daya ekonomi pendukung atau bahan dasar, kedua ialah sejauh mana kelompok kepentingan turut mendukung program pinjaman bergulir, dan yang ketiga adalah karakteristik para partisipan yakni mencakup tingkat kepatuhan dan responsifitas kelompok sasaran serta karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa terhadap implementasi program pinjaman bergulir.

Desa Bulusur khususnya Kelompok Swadaya Masyarakat rata-rata memiliki usaha diluar pemanfaatan sumber daya alam yang ada, seperti produksi tempe, tempe keripik, makanan kecil, dan usaha kecil lainnya. Usaha yang memanfaatkan sumber daya yang ada di desa Bulusur sendiri belum terlihat, hanya beberapa pengrajin yang

memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar desa Bulusulur, itupun diluar anggota KSM.

Sebagai kelompok sasaran program pinjaman bergulir yang ditujukan kepada masyarakat, telah menerima sambutan dengan baik. Program pinjaman bergulir ini disambut baik oleh masyarakat desa Bulusulur. Harapan masyarakat mengenai program ini ialah mampu membawa perubahan yang lebih baik dengan memberikan bantuan modal pada kegiatan ekonomi. Oleh karena itu masyarakat khususnya kelompok sasaran sangat menyambut baik program ini. Kepatuhan masyarakat atau kelompok sasaran dalam setiap pengembalian pinjaman bergulir memang sangat menjadi perhatian khusus oleh UPK. Tuntutan ini diharuskan demi terlaksananya program pinjaman bergulir yang baik.

Karakteristik rezim yang berkuasa dalam penelitian tentang pinjaman bergulir di desa Bulusulur ini ialah menunjuk pada kekuatan dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa setempat. Sikap dari dukungan pemerintah dalam lingkup desa akan sangat berpengaruh pada keberlangsungan program. Poin ini sangat dimengerti oleh bapak kepala desa Bulusulur sehingga implementasi program pinjaman bergulir segala upaya untuk mendukung diberikan untuk mensukseskan program yang didampinginya.

C. PENUTUP

C.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang Implementasi Pemberian Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan kepada Usaha Kecil dan Menengah di Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Program Pemberian Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan kepada Usaha Kecil dan Menengah di Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri dilihat dari 6 indikator implementasi yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya implementasi, komunikasi dan karakteristik agen pelaksana program pinjaman bergulir di Desa Bulusulur merupakan program yang mampu mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan. Program pemberian pinjaman bergulir telah membantu masyarakat miskin dalam memberikan pinjaman modal terhadap usaha kecil masyarakat setempat serta membantu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.
2. Pelaksanaan program Pinjaman Bergulir di Desa Bulusulur dijumpai beberapa hambatan seperti kurangnya kepatuhan beberapa masyarakat peminjam atau KSM dalam pengembalian pinjaman, dan tidak adanya bahan dasar yang tersedia langsung di Desa setempat dalam pemenuhan kebutuhan usaha kecil dan menengah masyarakat.

C.2 Rekomendasi

Rekomendasi atau langkah –langkah yang mungkin diambil ialah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Wonogiri diharapkan mampu mempertahankan dan mengembangkan program serupa pinjaman bergulir karena sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin dalam menunjang kebutuhan ekonomi keluarga dari usaha kecil menengah yang dijalankannya.
2. Hambatan yang dihadapi dan ditemui dalam pelaksanaan program pinjaman bergulir di Desa Bulusulur maka perlu dilakukan pembenahan dalam melakukan sosialisasi, antara lain dengan menambah intensitas pertemuan dengan seluruh kelompok sasaran atau KSM. Harapannya dapat lebih mempererat hubungan implementor dengan seluruh kelompok sasaran dan rasa memiliki tanggung jawab terhadap pinjaman.
3. Berbagai upaya yang telah dilakukan implementor dalam pelaksanaan program pinjaman bergulir di Desa Bulusulur dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sudah cukup baik sekali, namun perlu ditambah porsi dalam hubungan tatap muka atau adanya agenda pertemuan rutin sebagai alat pemererat hubungan sangat diperlukan, hal ini juga dapat digunakan sebagai wadah dalam mengumpulkan aspirasi kelompok sasaran agar lebih baik, begitu sebaliknya hal ini dapat digunakan untuk memberi informasi kepada kelompok sasaran maupun memonitor KSM lebih mudah.
4. Selalu berusaha menjaga kestabilan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik di Desa Bulusulur agar keberlanjutan dalam pemberdayaan

masyarakat sesuai harapan. Pembinaan kepada Kelompok sasaran secara berkelanjutan juga sangat penting. Pembinaan dalam usaha masyarakat sangat dibutuhkan, mengingat sebagian besar usaha masyarakat tidak didukung adanya sumber bahan dasar utama yang tersedia di Desa Bulusur. Satu sisi hal ini menjadi masalah disisi lain hal ini menjadi peluang usaha baru dengan lebih memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa Bulusur, oleh karena itu pelatihan- pelatihan kepada kelompok sasaran perlu ditingkatkan agar melahirkan usaha baru yang secara langsung bahan dasarnya tersuplai dari daerah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kahar Badjuri & Teguh Yuwono. (2003). *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*, Semarang: Puskodak Universitas Diponegoro
- Agustino, Leo, (2002). *Dasar-Dasar Kebijakan*, Bandung, Alfabeta
- Barthos, Basir. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta. Bumi Aksara
- Dunn Wiliam, (1991). *Public Policy Analysis : An Introduction Second Edition*, Alih Bahasa (2003), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Ke-2, Yogyakarta ; Gajahmada University Press
- Hosio, J.E. (2007). *Kebijakan Publik dan Desentralisasi, Esai-esai dari sorong*. Yogyakarta. LaksBang
- Kian Wie, Thee. (1983). *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan. Beberapa Pendekatan Alternatif*. Jakarta .LP3ES
- Martini, Rina. (2010). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Semarang: FISIP Undip
- Moleong, Lexy J. (1999). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Ismail. (2009). *Pubic Policy Analysis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. ITS Press: Surabaya

Nugroho, Riant. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta. PT Elex media komputindo

Nugroho, Riant. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang, Model-model perumusan, implementasi dan evaluasi*. Jakarta. PT Elex media komputindo

Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy. Dinamika Kebijakan- Analisis Kebijakan- Manajemen Kebijakan*. Jakarta : Gramedia

Pandji Santosa, (2008). *Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Dovernance*, Bandung

Penny, D.H. (1990). *Kemiskinan Peranan Sistem Pasar*. Jakarta. UI Press

Prof. Dr. Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Rachbini. Didik J, dkk. (1995). *Negara dan Kemiskinan di Daerah*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan

S. Mulyadi. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada

Soekanto, Suryono, (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Sumodiningrat, Gunawan, (1997). *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, PT. Bina Rena Pariwara,

Susanto, Hari. (2006). *Dinamika Penanggulangan Kemiskinan, Tinjauan Historis Era Orde Baru*. Jakarta. Khanata

Suyono, Haryono. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat : Mengantar Manusia Mandiri, Demokratis dan Berbudaya*. Jakarta : Khanata

Wayne Parsons. (2006). *Public Policy : Pengantar dan Praktik Analisis Kebijakan*, Cetakan Ke-2, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta,

Winarno, Budi (2007). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses* (edisi revisi). Media Pressindo: Yogyakarta

Yuwono, Teguh dan Badjuri, Abdulkahar. (2003). *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*. Semarang : Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Undip

Dokumen/ Data :

Daftar KK Miskin PS2 Desa Bulusulur Kab. Wonogiri

Data BPS, Data dan Informasi kemiskinan 2009, Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011 (PPLS 2011), Berbagai macam publikasi BPS

PJM Pronangkis 2007 Desa Bulusur Kab. Wonogiri

Pedoman Umum PNPM Mandiri Perkotaan 2012

Petunjuk Teknis Pinjaman Bergulir 2012

Profil Desa Bulusur & LPJ Kepala Desa Bulusur Kab. Wonogiri Profil BKM Bangkit & Laporan Pertanggungjawaban BKM Bangkit Bulusur Kab. Wonogiri

Profil PNPM Mandiri Perkotaan Kab. Wonogiri

Wonogiri Dalam Angka 2013

Internet :

Pengertian PNPM Mandiri Perkotaan dalam http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=324 (diakses pada 10.19wib 14/03/2013)

Lowongan Jateng-DIY fasilitator kelurahan (FASKEL) dalam <http://carikerjajateng.blogspot.com/2013/01/pnpm-mandiri-perkotaan-fasilitator.html> (diakses pada 7 April 2014 pukul 15.24 WIB)

Garis Kemiskinan dalam [Id.wikipedia.org/wiki/Garis_kemiskinan](http://id.wikipedia.org/wiki/Garis_kemiskinan) (diakses tanggal 16 November 2012, 15.04wib)

Konsep dalam [Id.wikipedia.org/wiki/konsep](http://id.wikipedia.org/wiki/konsep) (diakses tanggal 16 November 2012, 15.47wib)

Indikator Kemiskinan Wonogiri dalam [Mdgs.wonogirikab.go.id/indicator-kemiskinan](http://mdgs.wonogirikab.go.id/indicator-kemiskinan) (diakses tanggal 17 November 2012, 10.24wib)

Mu'man Nuryana dalam Program Evaluation dalam <http://ditppk.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1029>, (diunduh pada Kamis 09.46wib 14/3/2013)

Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia dalam <http://www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas/> (diakses pada 13 Feb 2014 pukul 12.31 wib)

Kelompok program penanggulangan kemiskinan klaster dua pemberdayaan masyarakat dalam <http://www.tnp2k.go.id/id/program/klaster-ii-2/> (diakses pada 13 Feb 2014 pukul 12.36 wib)

Program Penanggulanagan Kemiskinan dalam <http://www.tnp2k.go.id/id/program/program/dprogram-program-nasional-pemberdayaan-masyarakat-mandiri/> (diakses pada 13 Feb 2014 pada pukul 12.38 wib)